



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 42 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 158 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 151), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 158 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.

Pasal I

BAB IV, Tabel 4.1 T-C 25 Tabel 4.2 BAB V, T-C 26 BAB VI Bagian 6.1, 6.2, 6.2, T-C 27 , BAB VII T-C 28 dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 121 Seri E Nomor 51) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 42 SERI E NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI PURWOREJO NOMOR 158 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
RENCANA STRATEGIS KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Kecamatan Bruno Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

T-C.25
Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bruno
Kabupaten Purworejo

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,00 Indeks	83,00 Indeks	83,50 Indeks	84,00 Indeks	86,00 Indeks
2.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,00 Indeks	83,00 Indeks	83,50 Indeks	84,00 Indeks	86,00 Indeks

BAB V
Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Kecamatan Bruno
Kabupaten Purworejo

TAK: Peningkatan Pelayanan Publik 2023			
MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Pengembangan wilayah Kecamatan Bruno dari Berbagai Bidang	1. Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah yang berkaitan
			2. Peningkatan sarana prasarana dan potensi di wilayah Kecamatan
		2. Optimalisasi pelaksanaan dan tindak lanjut musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan	3. Kecamatan ikut serta dalam penentuan RKPD sebagai tindak lanjut Musyawarah perencanaan pembangunan
		3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Kecamatan	4. Pengusulan tambahan pegawai dan mengikuti pendampingan / bintek peningkatan kapasitas SDM
		4. Pendampingan , fasilitasi desa dalam berbagai aspek yakni pemerintahan, pemberdayaan, kesejahteraan, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban umum	5. Pembinaan , koordinasi dan fasilitasi desa secara maksimal dalam segala aspek yakni pemerintahan, pemberdayaan, kesejahteraan, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban umum

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-KPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7) Penyediaan Bahan/Material;
 - 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu;

- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pengadaan Mebel;
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Mebel;
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;

- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
 - d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimbingan teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
 - 3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - 7) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - 8) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
 - 9) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 10) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - 11) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 12) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - 13) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;

- 14) Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 15) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

6.1 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bruno meliputi internal Aparatur dan masyarakat.

6.2. Pendanaan Indikatif

Seluruh pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan di Kecamatan Bruno bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo dituangkan kedalam T-C.27 sebagai berikut :

Tabel 6.1.
T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bruno
Kabupaten Purworejo

[illegible]

Tahun Persegi Daerah	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Target	Tahun/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan										Data Capaian pada Tahun/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kegiatan Pendukung										Kendali Kinerja pada Akhir Periode Berjalan		Unit Kerja Pemerintah Daerah Pemerintahan Kab	Lokasi								
					Tahun/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan										2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				2027		2028		2029		2030	
					Tahun/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan										2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				2027		2028		2029		2030	
					Tahun/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan										2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				2027		2028		2029		2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																						

Tipe/ta Pemerintah Daerah	Sesuai Pemerintah Daerah	Kode				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tipe/ta/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Target	Data Capaian pada Tahun Awal Pencapaian				Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kegiatan Pendukung												Unit Kerja Pemerintah Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		M1	D 4/5	D6	M 2000				2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029			
									Target	Page (Rp.)	Target	Page (Rp.)	Target	Page (Rp.)	Target	Page (Rp.)	Target	Page (Rp.)	Target	Page (Rp.)	Target	Page (Rp.)	Target	Page (Rp.)		
1	2				4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Kecamatan Bruno			
		7 01 01 209 0			Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Berada di Kawasan Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibina/Direhabilitasi	Unit							3	10.000.000	3	5.000.000	3	7.000.000	3	22.000.000	Kecamatan Bruno				
		7 01 01 209 10			Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Berada di Kawasan Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibina/Direhabilitasi	Unit	12 Bulan	2	3.804.000	2	1.731.000								2	5.535.000	Kecamatan Bruno				
		7 01 01 209 0			Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Berada di Kawasan Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibina/Direhabilitasi	Unit							2	5.000.000	2	2.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	Kecamatan Bruno				
		7 01 01 209 11			Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Berada di Kawasan Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibina/Direhabilitasi	Unit												0	0	0	Kecamatan Bruno				
		7 01 01 209 1			Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Berada di Kawasan Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibina/Direhabilitasi	Unit											1	10.000.000	1	10.000.000	Kecamatan Bruno				
		7 01 02			Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Berada di Kawasan Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibina/Direhabilitasi	%	12 Bulan	100%	76.000.000	100%	60.000.000	100%	100%	97.864.000	100%	96.397.160	100%	94.128.500	100%	484.488.000	Kecamatan Bruno				
		7 01 02			Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Berada di Kawasan Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibina/Direhabilitasi	Dokumen	1 dokumen	6	40.000.000	6	25.794.000	6	6	36.000.000	6	40.797.001	6	44.000.000	6	61.000.000	Kecamatan Bruno				
					Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Berada di Kawasan Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibina/Direhabilitasi	Dokumen		6					6				6		20		Kecamatan Bruno				
		7 01 02 201 01			Koordinasi/Sinergi Pencapaian dan Pencapaian Kegiatan Pemerintahan dengan Peningkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pencapaian dan Pencapaian Kegiatan Pemerintahan dengan Peningkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1 dokumen	1	13.836.000	1	13.836.000							2	27.673.000	2	27.673.000	Kecamatan Bruno			
		7 01 02 201 1			Koordinasi/Sinergi Pencapaian dan Pencapaian Kegiatan Pemerintahan dengan Peningkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pencapaian dan Pencapaian Kegiatan Pemerintahan dengan Peningkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan						1	1	16.400.000	1	17.000.000	1	17.000.000	3		Kecamatan Bruno				
		7 01 02 201 02			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5 dokumen	5	26.106.200	5	22.142.800								10	60.889.000	Kecamatan Bruno				
		7 01 02 201 2			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen							5	22.516.855	5	32.707.061	5	27.493.164	15		Kecamatan Bruno				

Tajuan Perangkat Daerah	Sarana Perangkat Daerah	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sarana/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		UR	B/P/D	PRO	REK	SUB K				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Page (Rp.)		
												Target	Page (Rp.)	Target	Page (Rp.)	Target	Page (Rp.)	Target	Page (Rp.)						
																				Realisasi	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		7	01	2	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan				2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	6	40.000.000	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno			
		7	01	08			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%		100%	100%	98.616.900	100%	70.182.400	100%	77.026.600	100%	75.106.000	100%	403.691.800	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno		
		7	01	08	204		Hasil : Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Dokumen		2	98.616.900	2	70.182.400	2	77.026.600	2	75.106.000	20	403.691.800	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno			
																		0		Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno				
		7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat			4	11.721.000	4	7.416.000				8	19.137.000	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno			
		7	01	03	201	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat				4	12.000.000	4	12.000.000	4	11.000.000	12	35.000.000	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno			
		7	01	03	201	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			10	86.794.800	10	62.706.400				20	149.501.200	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno			
		7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan				10	65.026.600	10	67.106.000	10	67.921.000	30	200.053.600	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno			
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		100%	100%	81.617.300	100%	26.281.900	100%	28.448.700	100%	29.283.000	100%	146.740.600	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno		
		7	01	04	204		Hasil : Tersusunnya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Dokumen		2	81.617.300	2	26.281.900	2	28.448.700	2	29.283.000	20	146.740.600	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno			
											2		2		2		2		10		Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno			
		7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		6 dokumen	6	20.101.700	6	13.183.900				12	33.285.600	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno			
		7	01	04	201	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan				6	19.369.800	6	19.000.000	6	19.097.552	18		Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno			
		7	01	04	201	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		2 dokumen	2	8.583.000	2	10.365.500				4	16.948.500	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno			
		7	01	04	201	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan				2	6.000.000	2	6.538.320	2	6.000.000	6		Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno			
		7	01	04	204		Hasil : Tersusunnya Dokumen Koordinasi Peningkatan Peran dan Fungsi Kepala Desa		Dokumen		1 dokumen	1	8.000.000	1	8.300.000	1	8.070.000	1	8.000.000	3	16.000.000	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno		
									Dokumen		1		1		1		1		3		Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	82,00 Indeks	83,00 Indeks	83,50 Indeks	84,00 Indeks	86,00 Indeks	86,00 Indeks
2	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,00	81,50	82,00 Indeks	83,00 Indeks	83,50 Indeks	84,00 Indeks	86,00 Indeks	86,00 Indeks
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM




PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005